



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik



RENJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK



Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan Strategi RENSTRA Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan disusun dengan mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RENJA SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Besaran pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan RENJA SKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Penyusunan Perencanaan Dokumen Perangkat daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja SKPD 2026 mengintegrasikan program Kabupaten Gresik. Renja SKPD Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tahun 2026 yang memuat prioritas Penyelamatan dan Pencegahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat Umum di Kabupaten Gresik. Secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku Kegiatan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik tepatnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan Program penyelamatan dan pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang ada diwilayah Kabupaten Gresik.

Oleh karena itu, program-program Penyelamatan dan Pencegahan yang tertuang dalam Renja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Kabupaten Gresik tahun 2026

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pembuatan Renja (Rencana Kerja) adalah untuk menjabarkan rencana strategis jangka menengah (Renstra) menjadi rencana kerja operasional tahunan yang lebih detail. Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi satuan kerja (SKPD/ OPD) untuk melaksanakan program

dan kegiatan dalam satu tahun, menyertakan indikator kinerja, serta menjadi dasar penyusunan anggaran (RKA).

Renja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2026 . Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada :

- a. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

2. TUJUAN

Tujuan utama pembuatan Renja adalah :

- a. Menjabarkan rencana strategis:
Menerjemahkan visi dan misi jangka panjang (Renstra) ke dalam program dan kegiatan konkret yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun.
- b. Menjadi pedoman pelaksanaan:
Memberikan arahan yang jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran.
- c. Menjadi acuan penganggaran:
Menjadi dasar dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar penggunaan dana lebih efisien dan sesuai

dengan prioritas kegiatan.

- d. Memastikan kesinambungan:
Merangkum kegiatan yang masih akan dilanjutkan (baseline) dan kegiatan baru (new initiative) yang diusulkan untuk tahun mendatang.
- e. Menjaga sinkronisasi:
Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan target pembangunan yang lebih besar, seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 202 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dan penyusunan RKA, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik mengemban amanat sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat terhadap ancaman kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi ini mencakup spektrum pelayanan yang luas, mulai dari upaya pencegahan proaktif, tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat, hingga operasi penyelamatan yang kompleks dan beragam.

Tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang semakin kompleks sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit reaktif pemadam api, melainkan telah menjadi entitas multi-layanan yang mencakup:

1. Pencegahan dan Pengendalian: Melaksanakan inspeksi, edukasi, dan penegakan standar keselamatan kebakaran.
2. Pemadaman dan Penyelamatan: Melakukan operasi pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada kondisi darurat non-kebakaran yang membahayakan manusia.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Membentuk dan membina Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagai garda terdepan ketahanan komunitas.
4. Manajemen Data dan Investigasi: Melakukan pendataan korban dan kerugian serta investigasi penyebab kebakaran sebagai dasar perbaikan kebijakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota menegaskan bahwa standar pelayanan sub urusan kebakaran dimana jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

- a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

T-C.29 (terlampir)

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Faktor penyebab
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung diri	Tidak tersediannya Vendor
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi relawan kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Efisiensi anggaran

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Target anggaran dan kinerja tercapai 100%
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Target anggaran dan kinerja tercapai 100%
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Target anggaran dan kinerja tercapai 100%

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Faktor penyebab
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, penyelamatan, dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingginya respon dan kepercayaan terhadap kinerja DPKP
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Meningkatnya permintaan untuk mengevaluasi alat proteksi kebakaran bagi pemilik bangunan

2.1.4. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

Dengan adanya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sehingga berdampak terhadap capaian Renstra dan berpengaruh terhadap penyusunan Laporan LKjIP yang tidak memenuhi target. Dan berdampak terhadap Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten / kota

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – faktor penyebab tersebut.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah mendahulukan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dengan anggaran yang minim dan memilih Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang sangat urgen yang berdampak pada pelaksanaan layanan penanggulangan kebakaran serta layanan penyelamatan lainnya, serta layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.

Analisis terhadap kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik harus berlandaskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan dipertegas secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, SPM merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana. Dengan demikian, setiap layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan kewajiban mutlak pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi ini, beserta potensi daerah yang menjadi domain kewenangan Dinas, serta pengaruh dari dinamika lingkungan strategis pada berbagai tingkatan saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap perumusan isu-isu strategis, disajikan analisis korelasi dalam tabel berikut:

1. Implikasi Potensi Daerah terhadap Spektrum Kewenangan dan Beban Tugas DAMKAR
2. Problematika Internal sebagai Faktor Kritis Penghambat Optimalisasi Layanan
3. Perspektif Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dinamika Lingkungan Eksternal sebagai Pembentuk Konteks Operasional
4. Isu Strategis DAMKAR Gresik: Sintesis Kebutuhan dan Respons Terencana

Adapun Tugas Utama pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam upaya pemenuhan capaian layanan dasar sebagai

berikut :

1. Mutu Pelayanan: Kecepatan Respons Melampaui Standar Nasional (Response Time)
2. Jangkauan Pelayanan: Realitas Permintaan Jauh Melampaui Perencanaan
3. Validasi Publik: Kepercayaan Masyarakat dan rasa aman akan layanan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semakin tahun bertambah.

pelayanan. Tabel 2.1 (T-C 30) terlampir.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 1120 sampai 1130 Bujur Timur dan 70 sampai 80 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km² (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2024 sebanyak 1.327.497 jiwa terdiri dari 667.540 laki-laki dan 659.957 perempuan

Sektor utama penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi terbesar (51,25%)), diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, serta Pertambangan dan Penggalian. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar (8,88%).

Sektor utama berdasarkan kontribusi PDRB :

1. Industri Pengolahan: Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Gresik dengan kontribusi terbesar, mencapai (51,25%) dari PDRB. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh aktivitas industri besar seperti PT Petrokimia Gresik dan PT Semen Indonesia, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manyar.
2. Perdagangan Besar dan Eceran: Sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian
3. Konstruksi: Merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi dalam perekonomian
4. Pertambangan dan Penggalian: Juga menjadi sektor penyumbang penting terhadap PDRB.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi ini, beserta potensi daerah yang menjadi domain kewenangan Dinas, serta pengaruh dari dinamika lingkungan strategis pada berbagai tingkatan saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap perumusan isu-isu strategis, disajikan analisis korelasi dalam tabel berikut:

Tabel. 2.3.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Pertumbuhan Pesat Kawasan Industri (risiko kebakaran tinggi akibat bahan mudah terbakar, proses industri, kepadatan infrastruktur, potensi insiden B3).potensi insiden B3).	Kurangnya sarana & prasarana untuk penanganan kebakaran industri & B3, SDM dengan spesialisasi B3 terbatas, risiko dari operasional JIPE, keterbatasan anggaran untuk modernisasi peralatan, belum ada MoU dengan semua industri.	Dampak lingkungan dari pembangunan & operasional industri, standar keselamatan bangunan & instalasi industri, pengelolaan limbah B3, penilaian risiko kecelakaan industri skala besar.	Perkembangan teknologi industri (membawa risiko baru & solusi baru), standar keselamatan industri global, rantai pasok global (ketergantungan pada bahan kimia/B3).	Kebijakan Nasional terkait Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), regulasi pengelolaan B3, Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti JIPE & tuntutan keselamatannya, SPM Kebakaran (kesiapsiagaan industri).	Konsentrasi industri di Jawa Timur & Gerbangkertosusila (meningkatkan risiko kumulatif & potensi insiden skala regional), kebutuhan koordinasi respons darurat B3 regional.	Optimalisasi Kesiapsiagaan & Penanganan Insiden Spesifik (Industri, B3); Penguatan Upaya Pencegahan & Mitigasi Kebakaran (di kawasan industri); Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Sumber Daya (Sarpras & SDM khusus industri/B3).
2. Perkembangan Kawasan Permukiman Signifikan (potensi kebakaran domestik tinggi, kepadatan penduduk, aksesibilitas terbatas di gang	Jangkauan layanan belum merata (belum ada pos di semua kecamatan rawan), jumlah armada & personel kurang, waktu tanggap belum optimal di beberapa area, kesadaran masyarakat tentang pencegahan	Integrasi aspek mitigasi risiko kebakaran & aksesibilitas kendaraan darurat dalam perencanaan tata ruang permukiman, standar	Urbanisasi & pertumbuhan permukiman informal/padat di kota-kota berkembang, peningkatan risiko kebakaran di lingkungan permukiman	Tuntutan pemenuhan SPM (waktu tanggap, cakupan layanan), Program Nasional Sejuta Rumah (dampak pada	Pertumbuhan penduduk & permukiman di kawasan metropolitan Gerbangkertosusila, kebutuhan akan standar layanan pemadam yang merata di seluruh	Peningkatan Responsivitas & Jangkauan Pelayanan; Penguatan Upaya Pencegahan & Mitigasi Kebakaran (di permukiman & melalui edukasi masyarakat);

sempit, munculnya permukiman baru di area sulit dijangkau).	kebakaran rendah, praktik pembakaran sampah.	keselamatan bangunan rumah tinggal, ketersediaan sumber air untuk pemadaman di permukiman.	padat.	pertumbuhan permukiman & kebutuhan proteksi), regulasi IMB/PBG terkait aspek keselamatan kebakaran.	wilayah aglomerasi.	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Sumber Daya (penambahan pos & armada).
3. Kerawanan Bencana Alam Tertentu & Interaksi dengan Satwa (kekeringan memicu kebakaran lahan; banjir & angin kencang memerlukan penyelamatan; evakuasi satwa liar/berbahaya).	Minimnya sumber air untuk pemadaman saat kemarau panjang, keterbatasan sarpras & SDM untuk penanganan bencana hidrometeorologi & penyelamatan satwa, belum semua personel terlatih untuk beragam jenis bencana/penyelamatan.	Penilaian kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, cuaca ekstrem), strategi adaptasi & mitigasi berbasis ekosistem, integrasi PRB dalam KLHS pembangunan daerah.	Perubahan Iklim (peningkatan frekuensi & intensitas cuaca ekstrem global), degradasi lingkungan & hilangnya habitat satwa (memicu konflik dengan manusia).	Kebijakan Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (API) & Mitigasi Bencana, sinergi dengan BNPB dalam penanggulangan bencana, perlindungan satwa liar nasional.	Peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di tingkat Provinsi Jawa Timur, isu kelangkaan air regional saat kemarau, kebutuhan koordinasi penanganan bencana & evakuasi satwa di tingkat regional.	Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim & Dinamika Lingkungan; Optimalisasi Kesiapsiagaan & Penanganan Insiden Spesifik (Penyelamatan non-kebakaran); Penguatan Kemitraan & Partisipasi Multipihak (dengan BPBD, komunitas peduli satwa).
4. Intensitas Lalu Lintas & Aktivitas Transportasi Tinggi; Kegiatan Masyarakat & Fasilitas Publik (risiko kecelakaan	Peralatan penyelamatan kecelakaan (rescue tools) terbatas & usang, SDM untuk technical rescue perlu ditingkatkan, koordinasi	Audit keselamatan (termasuk kebakaran & jalur evakuasi) pada fasilitas publik &	Peningkatan standar keselamatan transportasi global, perkembangan teknologi	Kebijakan Nasional Keselamatan Transportasi, regulasi terkait manajemen keselamatan di	Tingginya mobilitas & kepadatan lalu lintas di kawasan Gerbangkertosusila, kebutuhan respons cepat & terkoordinasi untuk	Peningkatan Responsivitas & Jangkauan Pelayanan (termasuk penyelamatan non-kebakaran);

lalin, industri, pelayaran; potensi kedaruratan di fasilitas publik/keramaian).	dengan pihak terkait (Dishub, Kepolisian, KSOP) perlu dioptimalkan, belum ada standar siaga di semua fasilitas publik.	infrastruktur transportasi, perencanaan rute evakuasi & jalur prioritas kendaraan darurat dalam sistem transportasi.	kendaraan (misal, kendaraan listrik & risiko baterai saat kecelakaan).	fasilitas publik, SPM terkait penyelamatan non-kebakaran.	kecelakaan di jalur-jalur utama regional.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Sumber Daya (peralatan rescue & SDM); Penguatan Kemitraan & Partisipasi Multipihak.
---	--	--	--	---	---	---

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan analisis permasalahan yang komprehensif dan pemetaan korelasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2, serta dengan mempertimbangkan potensi daerah, dinamika lingkungan strategis (global, nasional, regional), arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dan temuan Laporan KLHS RPJMD, maka dirumuskan isu-isu strategis utama yang akan menjadi fokus perhatian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Kualitas, Responsivitas, dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan: Menjamin layanan yang cepat, tepat, profesional, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, termasuk daerah sulit dijangkau dan kepulauan, guna meminimalkan dampak kerugian akibat kebakaran dan kondisi darurat lainnya.
- b. Penguatan Sistem Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Berbasis Risiko serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mengurangi frekuensi dan skala kejadian kebakaran melalui strategi pencegahan yang proaktif, edukasi publik yang masif, pengawasan standar proteksi kebakaran yang ketat, dan pemberdayaan masyarakat serta relawan kebakaran (REDKAR) secara berkelanjutan.
- c. Akselerasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran secara Komprehensif dan Berkualitas: Mencapai dan melampaui target-target SPM yang diamanatkan oleh regulasi nasional dalam aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen operasional, dan waktu tanggap pelayanan.

- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), dan Modernisasi Sarana Prasarana Pendukung: Memperkuat tata kelola organisasi, memenuhi kebutuhan kuantitas dan meningkatkan kualitas (kompetensi, kualifikasi, sertifikasi) aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta melakukan peremajaan, standarisasi, dan pengadaan sarana prasarana modern yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik risiko daerah.
- e. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kapabilitas Penanganan Insiden Spesifik dan Berisiko Tinggi: Mengembangkan kemampuan khusus dalam penanganan kebakaran di kawasan industri, insiden yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), operasi penyelamatan non-kebakaran yang kompleks (misalnya di perairan, ketinggian, atau struktur runtuh), serta insiden berskala besar.
- f. Penguatan Sinergi, Kolaborasi, dan Kemitraan Strategis Multipihak: Membangun dan melembagakan kerjasama yang efektif dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, instansi vertikal (TNI/Polri), pemerintah daerah lain, sektor swasta/industri (melalui Forum Pemadam Kebakaran), akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.
- g. Peningkatan Adaptabilitas dan Resiliensi terhadap Dampak Perubahan Iklim serta Dinamika Lingkungan Strategis Lainnya: Mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan dan operasional, serta meningkatkan ketangguhan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dan risiko lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas kejadian darurat.
- h. Pengembangan dan Integrasi Sistem Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan yang Andal, Mutakhir, dan Terpadu: Membangun sistem

pendukung keputusan yang berbasis data (evidence-based), meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan, memperkuat infrastruktur komunikasi darurat, serta menyediakan informasi publik yang transparan dan mudah diakses terkait layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pola pikir penyusunan Renja diawali oleh kegiatan untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen dan pengerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisisnya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati.

Tahun 2026, implementasi rencana aksi SPM tahap pertama akan dimulai, dengan fokus pada pengadaan sarana prasarana SPM yang paling prioritas (seperti APD dan peralatan operasional dasar), diikuti dengan peningkatan jumlah SDM yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemadam I. Uji coba dan evaluasi terhadap SOP layanan yang telah diperkuat akan dilakukan secara intensif, serta dimulainya program pembangunan atau rehabilitasi Pos Pemadam Kebakaran pada lokasi-lokasi prioritas tahap pertama. Untuk aspek pencegahan, program sosialisasi dan edukasi publik tahap pertama akan diluncurkan, bersamaan dengan implementasi inspeksi industri tahap pertama yang difokuskan pada industri dengan klasifikasi risiko berat dan sedang III. Pembentukan dan pelatihan dasar REDKAR akan diperluas ke kecamatan-kecamatan prioritas lainnya, didukung dengan pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif.

anggaran 2026 diberikan pagu sebesar Rp. 12.763.284.251,75,- Dengan jumlah 9 kegiatan, 28 sub kegiatan

Pagu Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan
Tahun 2025 - 2026

Tabel 2.4

No	Kode	Urusan/Bid Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2025		APBD 2026	
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			11.108.235.085,00		12.763.284.251,75
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.108.235.085,00		12.763.284.251,75
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.108.235.085,00		12.763.284.251,75
572	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL)		6.985.395.980,00		8.033.205.377,00
1	05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Strategis dan Tahunan Perangkat Daerah (Renstra, Renja) sesuai Standar Kualitas dan Ketepatan Waktu.		14.702.482,00		16.907.854,30
1	05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	10.474.214,00	4	12.045.346,10
1	05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	4.228.268,00	6	4.862.508,20
1	05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu dan Kualitas Penyajian Laporan		6.148.970.264,00		7.071.315.803,60

						Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah.				
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	6.141.962.825,00	49	7.063.257.248,75
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	3.052.060,00	6	3.509.869,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	3.955.379,00	12	4.548.685,85
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Standar Kebutuhan Layanan dan Sarana Administrasi Umum Perkantoran.		183.980.034,00		211.577.039,10
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	15.208.000,00	12	17.489.200,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	46.129.200,00	12	53.048.580,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	30.037.234,00	12	34.542.819,10

1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material				
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	35.416.600,00	12 40.729.090,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	57.189.000,00	12 65.767.350,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan dan Keandalan Layanan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Esensial.		194.199.600,00	223.329.540,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	194.199.600,00	12 223.329.540,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Strategis yang Memenuhi Standar Kondisi Laik Pakai dan Kesiapan Operasional.		443.543.600,00	510.075.140,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	123.200.000,00	12 141.680.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	25.700.000,00	12 29.555.000,00

1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	43.000.000,00	12	49.450.000,00
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	251.643.600,00	12	289.390.140,00
573	1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.523.267.652,00		1.740.571.703,80
	1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.281.657.251,00		1.445.230.542,65
					Indeks Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran (%). (Mengukur pemenuhan berbagai indikator teknis SPM seperti sarpras, SDM, manajemen operasional, dll.)				
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12	4.795.200,00	12	5.514.480,00
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	311.522.000,00	12	358.250.300,00
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan	12	251.046.799,00	12	288.703.818,85

					Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12	4.795.200,00	12	5.514.480,00
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	12	24.935.040,00	12	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12	675.453.012,00	12	776.770.963,80

1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	9.110.000,00	12	10.476.500,00
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		41.059.250,00		64.707.337,50
					Persentase Cakupan Desa/Kelurahan dengan Layanan Inspeksi Berkala untuk Pemetaan Risiko dan Evaluasi Kesiapan Mitigasi Bencana Kebakaran.				
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	4.168.950,00	12	4.794.292,50
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	36.890.300,00	12	42.423.845,00
1	05	04	2.02	0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				

						Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12		12	17.489.200,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri dalam Kesiapsiagaan dan Respons Awal Kebakaran melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang Aktif dan Terbina.		24.875.400,00		28.606.710,00
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	20.080.200,00	12	23.092.230,00
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	12	4.795.200,00	12	5.514.480,00
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase keberhasilan operasi dalam batas waktu standar dan tanpa eskalasi signifikan (%).		175.675.751,00		202.027.113,65

1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia					
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12	64.492.000,00	12	74.165.800,00
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi					
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	12	111.183.751,00	12	127.861.313,65

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran merupakan hasil rumusan dan usulan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses forum OPD. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang insidentil dan harus segera ditangani seperti kejadian kebakaran. Usulan Program dari para pemangku kepentingan tahun 2026 dan akan disajikan pada Tabel T-C.32 (terlampir)

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tinjauan terhadap RPJMD yang ada pada Kabupaten Gresik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masuk dalam urusan wajib sebagai pelayanan dasar pada Urusan Pelayanan, perlindungan masyarakat. Pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu Membangun Infrastruktur yang berdaya saing memakmurkan desa dan menata kota. Kelemahan pada Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu tidak memiliki organisasi vertikal yang lebih tinggi pada tingkat provinsi, sedangkan pada tingkat kementerian Pemadam Kebakaran ada pada Kementerian Dalam Negeri yang hanya durus oleh Sub Bidang Kebakaran berfungsi sebatas Regulator, pembuat standar peraturan, pembinaan dan penyelenggara Diklat.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gresik Periode 2025-2029 adalah Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 adalah terwujudnya "Gresik Baru Lebih Maju" melalui lima program prioritas: memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang unggul, mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, menyelesaikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan sistem pemerintahan yang

bersih dan berorientasi pelayanan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. NSPK: Permendagri 114/2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran (seluruh aspek: jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar).
 - Sasaran RPJMD (Misi Ketiga): ***Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah.***
 - Sasaran RPJMD (Misi Pertama): ***Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia. (Mendukung masyarakat yang cerdas akan risiko)***
 - Sasaran RPJMD (Misi Kedua): ***Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah... (Melindungi aset ekonomi).***

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ***tujuan*** dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki tujuan :

1. Terwujudnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Profesional, Andal, dan Merata melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurunnya angka kejadian kebakaran.
2. Meningkatnya efektivitas sistem pencegahan dan mitigasi kebakaran yang komprehensif, berbasis risiko, dan didukung ***Sasaran*** dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

1. Meningkatnya tingkat pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran secara komprehensif.

2. Meningkatnya kecepatan dan efektivitas waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan.

Indikator dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

1. Indeks Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran (%).
(Mengukur pemenuhan berbagai indikator teknis SPM seperti sarpras, SDM, manajemen operasional, dll.)
2. Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit).
3. Persentase keberhasilan operasi pemadaman kebakaran dalam batas waktu standar dan tanpa eskalasi signifikan (%).
4. Jumlah tempat kerja/area industri yang diinspeksi sistem proteksi kebakarannya berdasarkan klasifikasi potensi bahaya (sesuai Kepmenaker No.KEP.186/MEN/1999) (lokasi).
5. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang aktif, terlatih, dan memiliki sarana prasarana dasar (unit).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan tabel 3.1

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Permendagri 114/2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran (seluruh aspek: jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar) Sasaran RPJMD (Misi Ketiga): Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah. (IKD RPJMD: Indeks Resiko Bencana) (Sasaran Renstra OPD terkait di RPJMD untuk DAMKAR: Mitigasi Bencana; Indikator: Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran). Rekomendasi SAKIP & Analisis Internal: Perubahan fokus sasaran strategis ke Pemenuhan SPM.	1. Terwujudnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Profesional, Andal, dan Merata melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	1.1. Meningkatnya tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran secara komprehensif.	Indeks Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran (%). (Mengukur pemenuhan berbagai indikator teknis SPM seperti sarpras, SDM, manajemen operasional, dll.)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indeks ini merupakan komposit dari berbagai sub-indikator SPM..

		1.2. Meningkatnya kecepatan dan efektivitas waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan.	Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit).	25	≤22	≤20	≤18	≤16	≤15	≤15	Target 2029 selaras dengan target SPM (15 menit). Memerlukan upaya signifikan dalam penambahan pos, armada, serta manajemen operasional. Berkontribusi langsung pada penurunan Indeks Risiko Bencana.
--	--	--	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

		1.3. Meningkatnya tingkat keberhasilan dan kualitas penanganan kebakaran serta operasi penyelamatan.	Persentase keberhasilan operasi pemadaman kebakaran dalam batas waktu standar dan tanpa eskalasi signifikan (%).	60%	65%	70%	75%	80%	85%	>85%	Memerlukan definisi operasional yang jelas untuk "keberhasilan" dan "batas waktu standar". Indikator ini juga bagian dari kualitas layanan SPM.
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

NSPK: Permendagri 114/2018 (pencegahan, partisipasi masyarakat); Kepmenaker No.KEP.186/MEN/1999 (Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja) Sasaran RPJMD (Misi Pertama): Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia. (Mendukung masyarakat yang cerdas akan risiko) Sasaran RPJMD (Misi Kedua): Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah... (Melindungi aset ekonomi).	2. Meningkatnya efektivitas sistem pencegahan dan mitigasi kebakaran yang komprehensif, berbasis risiko, dan didukung partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha.	2.1. Meningkatnya upaya pemeriksaan standar proteksi kebakaran pada tempat kerja/area industri berbasis klasifikasi potensi bahaya kebakaran.	Jumlah tempat kerja/area industri yang diinspeksi sistem proteksi kebakarannya berdasarkan klasifikasi potensi bahaya (sesuai Kepmenaker No.KEP.186/MEN/1999) (lokasi).	50	100	125	150	175	200	>200	Target disesuaikan dengan pemetaan jumlah & klasifikasi risiko industri/tempat kerja serta kapasitas inspektur DAMKAR yang sangat dipengaruhi keterbatasan anggaran program
--	---	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	---

		2.2. Meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat serta relawan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang aktif, terlatih, dan memiliki sarana prasarana dasar (unit).	20	50	80	110	140	170	200	Fokus pada pembentukan, pembinaan, dan fasilitasi REDKAR sebagai ujung tombak pencegahan dan respons awal di tingkat komunitas. Kualitas dan keberlanjutan REDKAR menjadi kunci.
--	--	---	--	----	----	----	-----	-----	-----	-----	--

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran. Program operasional yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik terangkum dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /kota.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan pokok sebagai :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

4. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan pokok sebagai :

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- d) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- e) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung diri
- g) Penyelesaian Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan , anatr lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
 - a) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - b) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - c) Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
 - a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - b) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan, dan / atau mengancam keselamatan manusia
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

*Program dan Kegiatan akan disajikan pada (**Tabel T-C.33**) terlampir*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tahun 2026 akan disajikan pada

Tabel 4.1
Rencana Kerja , Pendanaan , dan Kelompok Sasaran
Dinas Pemadam Kbakarand an Penyelamatan Kabupaten Gresik
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bid Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target		PAGU 2026	Kelompok Sasaran
					Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		12.763.284.251,75				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		12.763.284.251,75				
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		12.763.284.251,75				
572	1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL)	8.033.205.377,00				
1 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Strategis dan Tahunan Perangkat Daerah (Renstra, Renja) sesuai Standar Kualitas dan Ketepatan Waktu.	16.907.854,30				

1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	12.045.346,10	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	4.862.508,20	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					Tingkat Ketepatan Waktu dan Kualitas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah.			7.071.315.803,60	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Org/bulan	7.063.257.248,75	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	3.509.869,00	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	laporan	4.548.685,85	

					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Standar Kebutuhan Layanan dan Sarana Administrasi Umum Perkantoran.			211.577.039,10
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	17.489.200,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	53.048.580,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	34.542.819,10
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	paket	40.729.090,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	65.767.350,00
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan dan Keandalan Layanan Jasa Penunjang			223.329.540,00

Operasional Perkantoran Esensial.					
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					12
					Laporan
					223.329.540,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Strategis yang Memenuhi Standar Kondisi Laik Pakai dan Kesiapan Operasional.
					510.075.140,00
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
					12
					unit
					141.680.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					12
					unit
					29.555.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					12
					unit
					49.450.000,00

1	05	01	2. 09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	289.390.140,00
573	1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indeks Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran (%). (Mengukur pemenuhan berbagai indikator teknis SPM seperti sarpras, SDM, manajemen operasional, dll.)			1.740.571.703,80
1	05	04	2. 01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit).			1.445.230.542,65
1	05	04	2. 01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12	Dokumen	5.514.480,00
1	05	04	2. 01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	358.250.300,00

1	05	04	2. 01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	Dokumen	288.703.818,85
1	05	04	2. 01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12	Orang	5.514.480,00
1	05	04	2. 01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh	12	Desa	

Desa/Kelurahan Setiap
Tahunnya

1	05	04	2. 01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12	Unit	776.770.963,80
1	05	04	2. 01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Dokumen	10.476.500,00
1	05	04	2. 02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
					Persentase Cakupan Desa/Kelurahan dengan Layanan Inspeksi Berkala untuk Pemetaan Risiko dan Evaluasi Kesiapan			64.707.337,50

Mitigasi Bencana Kebakaran.					
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
					12 Dokumen 4.794.292,50
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
					12 Dokumen 42.423.845,00
1	05	04	2.02	0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
					12 Laporan 17.489.200,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
					Persentase Desa/Kelurahan Mandiri dalam Kesiapsiagaan dan Respons Awal Kebakaran
					28.606.710,00

					melalui Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang Aktif dan Terbina.			
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	Orang	23.092.230,00
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	12	Desa	5.514.480,00
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase keberhasilan operasi dalam batas waktu standar dan tanpa eskalasi signifikan (%).	202.027.113,65	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			

					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12	Laporan	74.165.800,00
1	05	04	2. 05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	12	Unit	127.861.313,65

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2026 ini disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 serta pedoman pelaksanaannya di tahun 2026. Semoga substansi yang telah disusun dapat menggambarkan upaya pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dalam mendukung tercapainya target kinerja Daerah. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gresik tahun 2026 dapat dicapai.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK


Pengguna Anggaran
SUYONO, S.H., S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19680314 199309 1 002

